

PERAN TNI AL DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTAHANAN

NAVY'S ROLE IN SUPPORTING INDONESIA AS A GLOBAL MARITIME FULCRUM IN MANAGEMENT PERSPECTIVE

Yusrah Muhammad Haras¹

Universitas Pertahanan
(yusrah.haras@gmail.com)

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran TNI AL untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dalam pilar visi Poros Maritim Dunia, TNI AL merupakan kekuatan utama untuk membangun pertahanan maritim. Dengan demikian, penting untuk menganalisis peran TNI AL untuk mendukung Poros Maritim Dunia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi baik yang dapat mendukung maupun menghambat peran TNI AL tersebut. Penelitian ini menggunakan teori *navy trinity* Ken Booth, teori *sea power* Mahan, konsep keamanan Buzan, konsep keamanan maritim Bueger dan konsep *good governance* dan *defense management*. Proses analisis dilakukan melalui metode kualitatif menggunakan teknik analisis *Soft Systems Methodology*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI AL secara konvensional dapat mendukung visi Poros Maritim Dunia melalui peran militer, polisionil dan diplomasi. Pada konteks yang lebih kontemporer, TNI AL dapat berperan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dari perspektif manajemen pertahanan, faktor anggaran, personil dan alutsista menjadi faktor penghambat peran maksimal TNI AL. Namun demikian, ditetapkan TNI AL sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan pilar kelima Poros Maritim Dunia, geografi Indonesia dan hubungan TNI AL dengan Angkatan Laut di luar negeri dalam berbagai bentuk kerjasama menjadi faktor pendukung dari peran TNI AL untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Kata Kunci: Poros Maritim Dunia, Peran TNI AL, Manajemen Pertahanan, *Soft System Methodology*, NVivo.

Abstract - This Thesis is subjected to discuss Indonesian National Navy Role in supporting Indonesia as a Global Maritime Fulcrum in Management Perspective. As in the vision of a Global Maritime Fulcrum the Indonesian Navy is the main actor who have a vital role to develop maritime defence. As a result, it is important to analyze The Indonesian Navy (TNI AL) role in supporting Indonesia as a Global Maritime Fulcrum and the factors that have supporting or obstructing effects. This research utilizes several theoretical framework such as, the theory of navy trinity by Ken Booth, The theory of Sea Power by Mahan, the concept of security by Buzan, the concept of maritime security by Bueger and the concept of good governance and defence management. This research aslo applies Soft System Methodology (SSM) to systemize the analysis process. And uses NVivo Software to collect data. The collection of data was primarily conducted though in depth interview. The result of the research shows Indonesian Navy in a conventional way is supporting the vision of Global Maritime Fulcrum through military, constabulary and diplomatic roles. In a more contemporary context, Indonesian National Navy have a role though Military Operathions other than War (MOOTW). Through a Defence Management perspective, budget, personel and alutsista are the obstructing factors of the role of The Indonesian Navy. However, Indonesia Navy as considered as the main

¹ Penulis merupakan alumnus pasca sarjana Universitas Pertahanan program studi Manajemen Pertahanan (MP), Fakultas Manajemen Pertahanan.

powerful actor to actualize the Global Maritime Fulcrum, the Indonesian geography and the relation of the Indonesia National Navy with overseas in form of cooperation is considered as a supporting factor of Indonesian Navy to actualize the vision of Maritime Global Fulcrum.

Key Words: *Global Maritime Fulcrum, Indonesian Navy Role, Defence Management, Soft System Methodology, NVivo.*

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat KTT ASEAN menyatakan bahwa laut merupakan faktor yang sangat penting bagi masa depan Indonesia karena strategisnya lokasi Negara Indonesia yang terletak antara dua samudera dan dua dunia sehingga Indonesia harus dapat menegaskan dirinya sebagai poros maritim dunia atau negara yang bertumpu kepada sektor maritim. Konsep poros maritim dunia yang diinstruksikan oleh presiden tersebut kemudian dijabarkan menjadi lima pilar penting yaitu pembangunan kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim serta penguatan pertahanan maritim². Dari ke-lima pilar tersebut, terdapat dua pilar yang sangat berkaitan dengan pertahanan serta

keamanan yaitu pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim serta penguatan pertahanan maritim.

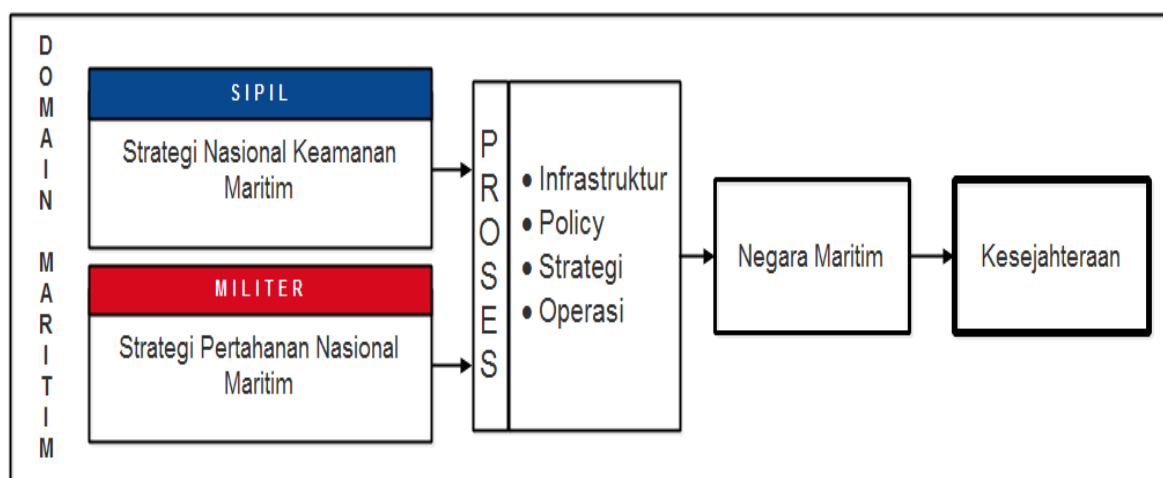
Pada konektivitas maritim, meskipun pelabuhan dan armada kapal memiliki peran vital akan tetapi institusi pengamanan maritim pun tidak kalah penting kontribusinya untuk menjaga terciptanya jalur perdagangan di perairan Indonesia yang kondusif. Adanya pengembangan konektivitas maritim yang identik dengan pelabuhan dan armada kapal seharusnya dapat diimbangi pula dengan adanya institusi sipil yang berperan dalam mewujudkan keamanan maritim. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Cina, pengamanan diberikan kepada institusi sipil yaitu *coast guard* (lihat gambar 1.2) yang diberikan wewenang untuk melakukan formulasi strategi nasional keamanan maritim. Akan tetapi di Indonesia, institusi sipil yang diamanatkan untuk melakukan pengamanan maritim adalah Bakamla meskipun pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan dari pembentukan Bakamla. Pembentukan Bakamla

² Diakses dari website <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> pada Hari Senin, 10 Oktober 2016

merupakan suatu *political blunder* yaitu karena ketidakjelasan doktrin yang seharusnya menjadi pegangan Bakamla dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta buramnya pihak *top management* Bakamla³. Hal tersebut menjadikan institusi TNI AL yang merupakan *single actor* dalam ranah pertahanan harus dapat pula bekerja dalam rangka mewujudkan keamanan maritim.

Dari segi anggaran, dalam APBN-P 2015, anggaran untuk TNI AL jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran

untuk TNI AD yaitu Rp. 14,4 Trilyun berbanding Rp. 39,9 Trilyun⁴. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi menyebutkan bahwa dengan anggaran tersebut, TNI AL harus dapat meningkatkan kualitas program dan operasinya terlepas dengan terbatasnya anggaran tersebut. Dengan kata lain, institusi TNI AL harus dapat mengolah anggaran yang ada secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, pilar ke-lima yaitu penguatan pertahanan maritim merupakan pilar yang penting dalam mengimbangi konektifitas maritim.



Gambar 1. Konsep Ideal Pertahanan dan Keamanan Maritim

³ Robert Mangindaan, *Optimalkah Postur TNI Mengamankan Poros Maritim Dunia?*, Kajian FKPMaritim diakses dari website <http://www.fkpmaritim.org/optimalkah-postur-tni-mengamankan-poros-maritim-dunia/>

⁴ Diakses dari website <http://jurnalmaritim.com/2015/04/anggaran-minim-pertahanan-poros-maritim/> pada Hari Senin, 10 Oktober 2016

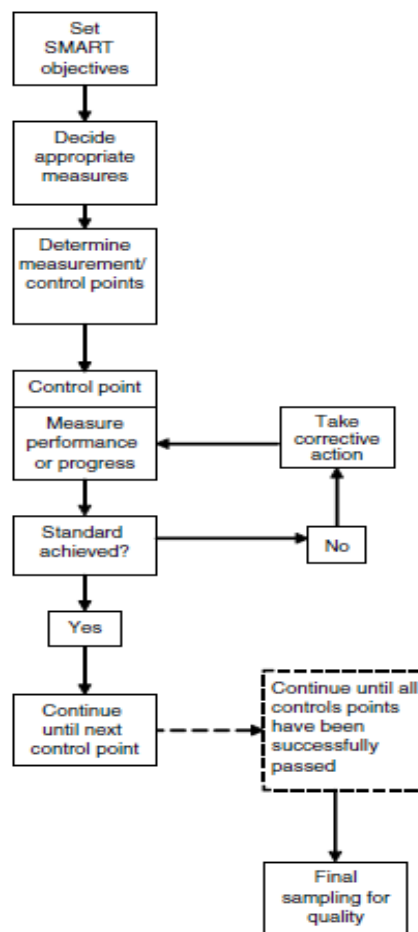
TNI AL diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 yang memuat ketentuan bahwa TNI AL bertugas untuk melaksanakan tugas matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah laut.

Dengan partisipasi aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia. Namun demikian, secara formal, Indonesia belum memiliki satu platform formal tentang strategi militer nasional dan strategi keamanan maritim dalam jangka panjang yang akan mempengaruhi peran dari TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan keamanan dan pertahanan di laut. Selain itu dengan adanya keterbatasan pada institusi TNI Angkatan Laut dari segi

anggaran dalam mewujudkan keamanan maritim di perairan Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab bahwa TNI Angkatan Laut adalah institusi yang paling memiliki kemampuan jika dibandingkan institusi sipil lainnya seperti BAKAMLA. Dalam hal ini, manajemen pertahanan merupakan konsep yang ideal dan sangat relevan dalam rangka meningkatkan peran institusi TNI Angkatan Laut secara maksimal baik dalam pertahanan maupun keamanan maritim di perairan Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia.

Konsep Governance and Management of Defence

Saat ini, seluruh organisasi baik organisasi public maupun pada sektor privat membutuhkan suatu manajemen agar dapat melaksanakan tujuan organisasinya secara efektif dan efisien tidak terkecuali pada sektor pertahanan (lihat gambar 2.2). Pentingnya penerapan prinsip manajemen yang baik dapat menghasilkan suatu reformasi pada sektor pertahanan dan keamanan yang nyatanya telah berkembang pada dunia internasional.



Gambar 2. Fungsi Manajemen Pada Sektor Pertahanan

Pada sistem demokrasi, penerapan proses manajemen pada suatu institusi public dilaksanakan dengan integritas dan prinsip keterbukaan sehingga organisasi dapat mempertanggungjawabkan tugas sesuai dengan kepentingan nasionalnya⁵. Secara umum, konsep manajemen pertahanan menganut prinsip yang sama dengan konsep manajemen yang memperkenalkan bahwa pada

manajemen terdapat lima fungsi yang sangat penting yaitu:

1. *Planning*

Tujuan penting dari *planning* atau perencanaan adalah menentukan objektif atau tujuan sehingga dapat memfokuskan aktifitas seluruh anggota organisasi serta menentukan standar serta waktu yang akan ditempuh. McConville⁶ Contoh aplikatif *planning* pada sektor pertahanan adalah: (Who) pengelola *reserve force*, (What) mengelola database kekuatan,

⁵ Laura Cleary dan Teri McConville, *Managing Defence in a Democracy*, New York, Routledge Publishing, 2006

⁶ *Ibid.*

(*When*) setiap tiga bulan, (*Standard*) memilah kontak detail dan data medic, (*Condition*) saat damai.

2. *Organizing*

Dengan perencanaan yang baik maka tahap *organizing* akan menjadi lebih mudah. Pada tahap ini, mengatur alokasi sumber daya pada organisasi dapat memberikan indikasi seberapa penting fungsi dari sub-organisasi tersebut. Alokasi sumber daya terdiri dari *finance*, *people* dan *equipment*. Ketiga sumber daya tersebut menentukan performa dari institusi pertahanan. Dari segi *finance*, terdapat kewajiban yang melekat pada manajer sektor public bahwa setiap anggaran yang digunakan haruslah dapat menciptakan suatu keuntungan dari segi kapabilitas pertahanan. Segi lainnya, yaitu *people* merupakan suatu aset yang tidak kalah pentingnya sehingga untuk melakukan suatu operasi diperlukan suatu proses rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan jumlah yang sesuai pula. Terakhir, dari segi *equipment* adalah aspek penting untuk mendukung efektifitas kinerja dari sumber daya manusia. Dalam hal ini, termasuk pula dalam mengambil keputusan pengadaan *equipment* yang dari segi

harga cenderung mahal dan anggarannya harus seimbang dengan sektor selain pertahanan.

3. *Commanding*

Seorang pemimpin dalam organisasi terkait pertahanan seharusnya dapat mengajak seluruh anggota organisasi agar termotivasi untuk bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Uang merupakan isu dan motivasi bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini seorang pemimpin idealnya dapat menerapkan sistem *reward and punishment* merujuk pada perusahaan swasta yang telah terbiasa menerapkan sistem tersebut sehingga anggota organisasi dapat bekerja lebih keras karena ada imbalan yang sesuai.

4. *Coordinating*

Fungsi *coordinating* pada intinya adalah bagaimana seorang pemimpin dapat berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi lainnya agar dapat menggabungkan seluruh usaha anggota organisasi dalam mencapai objektif yang telah ditentukan. Pada sektor pertahanan, terdapat suatu prinsip penting yaitu *need to know principle* di mana seorang individu dapat mengetahui untuk apa dia melakukan suatu pekerjaan serta apa

perannya dalam mencapai suatu objektif organisasi. Seseorang yang dipaksa untuk melaksanakan tugas tanpa mengetahui untuk apa tugas tersebut dilaksanakan akan merasa bahwa dirinya tidak dipercaya oleh pemimpin dan akan terdemotivasi.

5. *Controlling*.

Kontrol yang tepat dimulai dengan perencanaan yang baik. Jika tujuan yang jelas telah dirancang, maka seluruh anggota organisasi harus dapat melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan objektif serta standar yang jelas pun harus ditetapkan. Kontrol merupakan cara terbaik untuk mengukur output, atau kinerja. Pada sektor pertahanan dan keamanan, pengukuran menjadi masalah karena sulitnya menetapkan tolak ukur organisasi dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mengingat hal tersebut sangat subjektif dan belum ada tolak ukur yang sama mengenai definisi pertahanan dan keamanan itu sendiri.

Pembahasan

Tentunya paradigma Poros Maritim Dunia jelas berdampak signifikan pada aspek pertahanan, khususnya bagi TNI Angkatan Laut dan membawa implikasi

bahwa peran Angkatan Laut berkaitan dengan beberapa aspek Poros Maritim Dunia yaitu:

1. Aspek pertama yaitu budaya maritim. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini perlu kembali menata sistem kelautan melalui hasrat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. TNI AL merupakan garda terdepan mewujudkan upaya tersebut, berperan besar bertanggung jawab dalam upaya keselamatan maritim. TNI Angkatan Laut berperan besar tidak hanya dalam menjaga tetapi berperan dalam rangka membangun kembali budaya maritim Indonesia serta meningkatkan keamanan maritim.
2. Aspek kedua dalam menjaga dan mengelola laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan sebagai bangsa yang ditakdirkan dengan luas wilayah perairan melebihi luas daratnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga mengundang potensi ancaman. TNI Angkatan Laut bertugas untuk pengamanan wilayah perairan Indonesia dan menegakkan hukum dan menjaga laut jika ada pelanggaran yang terjadi. TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi yang tidak terhenti dengan menyebar 40-50 kapal

di seluruh Indonesia dan adanya pembekalan mengenai pelanggaran di laut.

3. Aspek ketiga, berkaitan dengan aspek perdagangan internasional telah menjadikan Indonesia sebagai suatu alternatif yang penting dari lalu lintas barang jasa, dan berbagai kegiatan maritim lainnya. Komponen tersebut dianggap komponen penting karena memberikan pemanfaatan ekonomi bagi Indonesia sehingga mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim dunia. Peran TNI Angkatan laut di sini bertekad untuk mengamankan jalur perdagangan tersebut. Indonesia telah membangun Tol Laut, *deep seaport*, logistic dan industry perkapalan dan pariwisata maritim.
4. Aspek keempat, berkaitan dengan diplomasi maritim. Angkatan Laut melaksanakan tugas diplomasi dalam bentuk operasi muhibah, patroli, latihan bersama, symposium beskala internasional dan pelibatan unsur TNI Angkatan Laut dalam pasukan perdamaian PBB.
5. Aspek kelima, dari aspek pertahanan dan keamanan maritim dimana TNI Angkatan Laut yang kuat adalah jaminan untuk keamanan perairan

Indonesia. Untuk mengantisipasi berbagai jenis ancaman dalam perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut melaksanakan langkah langkah preventif dan reaktif. Langkah preventif dilaksanakan melalui operasi intelijen terpilih secara sinergi dengan prioritas tiga *trouble spot* yaitu: Laut Natuena, perairan Ambalat dan Laut Arafuru untuk operasi matra laut. Di sisi lain dalam langkah reaktif dilaksanakan melalui petrol rutin dengan menghadirkan unsur-unsur TNI Angkatan Laut di kawasan yurisdiksi nasional.

Kebijakan pertahanan (*defence policy*) diformulasikan sejalan dengan komponen-komponen kebijakan keamanan lainnya. Kebijakan pertahanan ini diarahkan untuk menangkal dan menghadapi bentuk ancaman yang berdimensi militer. Sementara respon terhadap bentuk-bentuk ancaman yang berdimensi non-militer ditangani oleh aktor-aktor keamanan nasional lainnya. Peran angkatan bersenjata nasional Indonesia diarahkan oleh kebijakan pertahanan dimana kemudian mengarah pada analisis kebutuhan kapabilitas untuk menghadapi ancaman dan resiko yang telah identifikasi pada analisis strategis sebelumnya. Berdasarkan analisis inilah

suatu strategi Angkatan Laut diformulasikan, yaitu menyangkut bagaimana mengorganisasikan dan menggunakan TNI Angkatan Laut berdasarkan ancaman lingkungan, kebutuhan kemampuan dan sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah. Hal ini kemudian mendorong kearah pembuatan keputusan-keputusan dalam berbagai wilayah kegiatan, semisal proyeksi kekuatan di masa depan, kemampuan operasional, doktrin operasional, pelatihan, pengadaan alutsista, dan infrastruktur pendukung. Dari sini selanjutnya dikembangkan doktrin dan konsep gabungan (*joint doctrine and concepts*).

Dalam fungsi managerial umum terdapat lima fungsi yang utama kemudian diterjemahkan sebagai berikut. Pertama pemimpin atau manager melakukan perencanaan (*planning*), apa yang akan dilakukan. Kemudian mengorganisasikan (*organizing*) untuk mencapai rencana tersebut, selanjutnya menyusun staff organisasi (*staffing*) dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Dengan sumber daya tersebut kemudian memberi arahan (*directing*) serta mengendalikan (*control*) sumber daya, dan menjaganya agar tetap beroperasi secara optimal.

Sementara menurut McConvile⁷ aspek manajemen pertahanan yang berhubungan adalah aspek perencanaan dan koordinasi. Kedua aspek tersebut berhubungan antara satu sama yang lain sehingga menghasilkan tujuan seefisien mungkin.

Perspektif lain, Sumaryono⁸ yang menyebutkan bahwa manajemen strategik adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategik, pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi.

Dalam Manajemen Pertahanan elemen *planning* dalam suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen yang pertama adalah perencanaan strategik yang terdiri dari visi, misi dan tujuan organisasi, sedangkan komponen yang kedua adalah perencanaan operasional yang berupa tujuan operasional dan pelaksanaan

⁷ McConvile, *Managing Defence in a Democracy*, New York, Routledge Publishing, 2006

⁸ Joko Sumaryono "Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum", Majalah Patriot, 2007, hlm. 3

fungsi-fungsi manajemen termasuk fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Dari pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi peran TNI Angkatan Laut terdapat lima fungsi konsep Manajemen Pertahanan McConville yang berkaitan sebagai berikut:

1. *Planning*. Melihat perkembangan lingkungan strategis terkini, perimbangan kekuatan, serta kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, Pemimpin TNI Angkatan Laut mengeahui perlu dilaksanakan perencanaan jelas terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia agar dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan TNI Angkatan Laut ke depan.
2. *Organizing*. Mekanisme transisi secara komprehensif melihat korelasi antara rencana strategis pertahanan dan program pengembangan postur pertahanan. Alokasi anggaran penelitian dan pengembangan pertahanan, dan alokasi sumber daya untuk industri strategis pertahanan. Mekanisme transisi tersebut dapat secara jelas menjabarkan perencanaan jangka menengah panjang yang secara gradual meningkatkan efisien dan

kemandirian sistem persenjataan Indonesia.

Dalam Buku Putih Pengembangan organisasi TNI Angkatan Laut diarahkan dalam rangka penataan satuan, serta melanjutkan validasi organisasi. Validasi organisasi TNI Angkatan Laut dilaksanakan dalam rangka pembentukan Koarmada RI terutama pembentukan organisasi pendukung di bawah satuan kerja (Satker) Koarmada.

Pengembangan personel TNI Angkatan Laut mengacu pada kebijakan *zero growth* dan *right sizing* sehingga kekuatan personel bersifat tetap. Dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber daya manusia yang profesional sejalan dengan modernisasi alutsista bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perawatan Alutsista TNI Angkatan laut sehingga TNI Angkatan Laut mencapai pilar Poros Maritim Dunia.

3. *Commanding*. Dalam organisasi pertahanan seorang pemimpin seharusnya dapat mengajak seluruh anggota organisasi agar termotivasi untuk bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Uang merupakan isu dan motivasi bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini

seorang pemimpin idealnya dapat menerapkan sistem *reward and punishment*.

Kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian, kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama.

TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari TNI yang bertugas untuk mengamankan lautan Indonesia, dalam menjalankan tugasnya TNI Angkatan Laut dibagi menjadi beberapa komando utama yang memiliki tugas masing-masing:

- a. Komando Armada Barat
- b. Komando Armada Timur
- c. Komando Lintas Laut Militer
- d. Korps Marinir
- e. Komando pengembangan dan pendidikan angkatan Laut
- f. Akademi Angkatan Laut
- g. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut.

Kesatuan perintah adalah sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan tidak diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari seorang petugas yang ada di atasnya. Dalam melaksanakan pekerjaan, prinsip

kesatuan perintah harus diperhatikan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, arahan dan sasaran bergantung pada kesatuan perintah.

4. *Coordinating*. Kerjasama dan dukungan yang jelas antara pemerintah dan sipil juga tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata. Beberapa negara berada dalam posisi untuk memberikan keamanan bangsa. Kondisi tersebut kemudian direspon oleh presiden melalui kebijakan dengan dilakukannya upaya penataan dan perubahan dalam peran instansi yang berwenang di laut. Arah perubahan yang telah disusun selanjutnya harus dikomunikasikan melalui jalur-jalur komunikasi yang tersedia kepada pihak yang terlibat dalam perubahan. Akan tetapi dari pernyataan pernyataan para informan, dapat terlihat bahwa adanya ketidakjelasan koordinasi perencanaan antara TNI AL dan instansi lainnya yang berwenang di perairan Indonesia. Koordinasi dilakukan untuk mendukung terwujudnya kebijakan Poros Maritim Dunia.
5. *Controlling*. *Pengawasan* merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama yang masih memiliki banyak kendala.

Oleh karena itu rencana harus dirubah, sehingga semua bidang mengikuti. Pengaturan di atas ditangani terpusat di tingkat Komando Armada Laut yang menyiapkan kapal sesuai prediksi ancaman di setiap wilayah. Kondisi keamanan maritim Indonesia, terutama di Asia Tenggara yang menjadi area bermain pada ranah kebijakan luar negeri bagi Indonesia menggambarkan adanya bentuk keamanan maritim yang perlu diwaspadai. Kesadaran untuk menghadirkan kekuatan laut yang mampu menjalankan fungsinya dari sisi pertahanan-keamanan. Fakta yang menjelaskan bahwa masih terdapat kelemahan dalam modernisasi sistem pertahanan, terutama dari sisi persenjataan dan arah kebijakan pertahanan menghadirkan tanda tanya besar tentang kesiapan Indonesia dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia.

Peningkatan jumlah ancaman dan status Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan lingkup geografisnya menjadi indikator yang menjelaskan bahwa keamanan maritim Indonesia masih menjadi perhatian yang perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu, dipahami bahwa perlunya keharusan

untuk segera membenahi berbagai faktor penghambat dalam bentuk modernisasi persenjataan yang mampu mendukung penguatan kekuatan laut Indonesia mengingat dampak gangguan pada keamanan maritim Indonesia tidak hanya pada ancaman tradisional maupun non-tradisional serta mencapai kesepakatan dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Saat ini, dalam mengimbangi berbagai ancaman dan tantangan untuk menghadapi keamanan maritim, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kekuatan lautnya melalui pembentukan Sistem Armada Terpadu yang sesuai dengan perencanaan strategis jangka mendatang dalam Kekuatan Pertahanan Minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF) 2024. Oleh karena itu fungsi dari Manajemen Pertahanan yang perlu diutamakan adalah *planning* dan *coordinating* untuk meningkatkan peran TNI Angkatan Laut dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia.

Kesimpulan

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, Angkatan Laut memiliki peran penting, secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, polisionil serta peran

diplomasi. Secara yuridis yang formal ketiga peran tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No.34 Tahun 2004. Oleh karena itu tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum diwilayah laut Indonesia sudah cukup. Meskipun pemerintah telah melakukan legalisasi kebijakan Poros Maritim Dunia dalam rangka pengamanan wilayah laut serta memperkuat pertahanan laut sulit untuk diterjemahkan secara operasional dan taktis walaupun sudah ada doktrin TNI Angkatan Laut. Dalam arti lain, dengan legalisasi kebijakan Poros Maritim Dunia atau tidak peran TNI AL sudah jelas. Akan tetapi signifikansi peran tersebut belum terlihat.

Walaupun dalam upaya pengamanan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia seluruh instansi terkait yang berwenang termasuk TNI Angkatan Laut, memiliki tanggung jawaban untuk melaksanakan tugasnya dan menanggulangi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, tidak terlepas dari berbagai faktor hambatan yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim

Dunia. Sebagaimana yang dijelaskan di pembahasan peraturan dapat menimbulkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi peran TNI AL dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia.

Perbedaan penafsiran dalam pengelolaan hukum diantara instansi yang berwenang. Di mana pengaturan kewenangan sudah jelas. Akan tetapi mencerminkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga proses pelaksanaan tugas untuk mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia tergantung kepada ego sektoral masing masing instansi sehingga dibutuhkan strategi keamanan maritim dan strategi militer nasional yang sinergis dengan kebijakan Poros Maritim Dunia agar mencapai pilar pengembangan keamanan dan pertahanan maritim. Selain itu Jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengawasan di laut tidak sebanding dengan wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Laura Cleary dan Teri McConville, *Managing Defence in a Democracy*, New York, Routledge Publishing, 2006

McConville, *Managing Defence in a Democracy*, New York, Routledge Publishing, 2006

Joko Sumaryono "Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum", Majalah Patriot, 2007, hlm. 3

Marsetio, L. T, (Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Diakses dari website <http://jurnalmaritim.com/2015/04/angggaran-minim-pertahanan-poros-maritim/> pada Hari Senin, 10 Oktober 2016

Diakses dari website <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> pada Hari Senin, 10 Oktober 2016

Robert Mangindaan, *Optimalkah Postur TNI Mengamankan Poros Maritim Dunia?*, Kajian FKPMaritim diakses dari website <http://www.fkpmaritim.org/optimalkah-postur-tni-mengamankan-poros-maritim-dunia/>